



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOMISI IX DPR RI
(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 32 (tiga puluh dua)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
Dengan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 27 September 2022
Pukul	: 13.00 WIB – selesai
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan tentang pembinaan UMKM dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan;2. Penjelasan tentang penanganan Badan POM dalam peredaran obat dan kosmetika ilegal termasuk yang diedarkan secara daring;3. Penjelasan tentang peran Badan POM untuk mewujudkan kemandirian nasional dalam penyediaan bahan baku yang bermutu untuk obat bahan alam yang berdaya saing sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2016.
Ketua Rapat	: Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A./ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dilanjutkan oleh: Charles Honoris/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Peserta Rapat Hadir dan Virtual	: A. Fisik 20 orang Virtual 13 orang dari 49 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP., beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dibuka pukul 13.50 WIB., dilaksanakan secara tatap muka, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk meningkatkan pembinaan pelaku usaha dengan melakukan pendampingan secara intensif kepada UMKM serta meningkatkan sosialisasi keamanan obat tradisional, pangan olahan dan kosmetik sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan UMKM dengan melibatkan *stakeholder* terkait.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk terus meningkatkan kerjasama sinergis dengan kementerian/lembaga terkait pengawalan dan pengembangan obat bahan alam dan bahan baku obat bahan alam demi terwujudnya kemandirian nasional sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI berkoordinasi dengan pihak terkait dalam mencari jalan keluar terhadap kekosongan vaksin meningitis untuk kebutuhan haji dan umroh.
4. Komisi IX DPR RI meminta Badan POM RI menyampaikan kumpulan terminologi dan istilah-istilah yang biasa digunakan (glosarium) oleh Badan POM RI secara tertulis paling lambat tanggal 4 Oktober 2022.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.10 WIB.

Jakarta, 27 September 2022

KEPALA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



Dr. Ir. PENNY K. LUKITO, MCP.

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



CHARLES HONORIS

A-162